



PUTUSAN

Nomor 110/Pdt.G/2025/PA.Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LEBONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir XXXXXXXX, 5 Februari 1985, NIK 170XXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan ini menggunakan alamat domisili elektronik email santiniko81@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir XXXXXXXX, 25 November 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Serabutan, tempat tinggal di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Juni 2025 yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Lebong dengan nomor perkara 110/Pdt.G/2025/PA.Lbg tanggal 16 Juni 2025 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2025/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXX, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, pada tanggal 12 Januari 2008, sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Kutipan Buku Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx, yang di keluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Kecamatan, tanggal xxxxxxxx;

2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikarunia 1 (satu) orang anak, yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, tempat tanggal lahir XXXXXXXX, 05 November 2009, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SD;

Anak tersebut ikut dengan Penggugat;

4. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXX, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, selama 3 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXX, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, selama 10 tahun, sampai dengan pisah tempat tinggal;

5. Bahwa, Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

5.1. Masalah ekonomi, kerana Tergugat tidak mau mencari pekerjaan sampingan, Tergugat lebih sering tidur siang dari pada mencari pekerjaan tambahan, sehingga Penggugat harus bekerja dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keperluan anak sekolah;

5.2. Tergugat mempunyai sifat cemburu berlebihan, sehingga

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2025/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki idaman lain, kemudian di saat Tergugat marah kepada Penggugat, Tergugat memukul Penggugat;

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu kembali terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 5 Juni 2024 berawal ketika Penggugat sedang makan malam dan Tergugat memegang handphone Penggugat, tiba-tiba ada pesan masuk dimedia sosial Penggugat yang Penggugat tidak kenal, sehingga Tergugat langsung menuduh Penggugat selingkuh sedangkan Penggugat tidak tahu apa-apa dan siapa orang yang mengirim pesan tersebut, Penggugat terus menjelaskan bahwa Penggugat tidak kenal orang tersebut, namun Tergugat tidak terima, akhirnya terjadilah perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat memukul kepala Penggugat kemudian Tergugat keluar dari rumah membawahi semua pakaian Tergugat;

7. Bahwa, sejak pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun karena Tergugat telah meninggalkan rumah milik orang tua Penggugat yang mana dalam pisah rumah saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua milik Penggugat di Dusun I, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

8. Bahwa, adanya permasalahan tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

9. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah di upayakan damai oleh keluarga;

10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2025/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berkenaan untuk:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 110/Pdt.G/2025/PA.Lbg melalui surat tercatat yang dikirim oleh Petugas tanggal 16 Juni 2025 dan diterima oleh orang yang tinggal serumah dengan Tergugat berada pada tanggal 17 Juni 2025 melalui aplikasi lacak kirim lalu dikirim lagi untuk kedua kali pada tanggal 26 Juni 2025 dan diterima oleh orang yang tinggal serumah dengan Tergugat pada tanggal 28 Juni 2025 melalui aplikasi lacak kirim, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2025/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxx, atas nama Tergugat dan Penggugat yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kabupaten Lebong, pada tanggal 12 Januari 2008, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P);

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, tempat tanggal lahir, Talang Leak, 15 Oktober 1984, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Muara Aman Curup, Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara Ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sekitar tahun 2008;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berpindah-pindah dan terakhir di rumah milik orang tua Penggugat di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi keuangan rumah tangga dan Tergugat juga mempunyai sifat cemburu yang berlebihan;
- Bahwa saksi sering melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan juga saksi mendapat selalu cerita dari Penggugat mengenai masalah rumah tangganya;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2025/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu pada Juni 2024, terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh karena ada pesan masuk ke dalam handphone padahal telah Penggugat sudah menjelaskan tidak kenal dengan pesan masuk tersebut tetapi Tergugat tidak percaya hingga terjadilah pertengkaran diantara keduanya bahkan sampai Tergugat memukul Penggugat kemudian Tergugat pergi dari kediaman bersama membawa semua pakaiannya;
- Bahwa saksi tahu sejak kejadian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 tahun hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali namun tetap tidak berhasil;

2. Saksi 2, tempat tanggal lahir, Embong Panjang, 13 Juli 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Muara Aman Curup, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sekitar 7 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berpindah-pindah dan terakhir di rumah milik orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXX, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi keuangan rumah tangga dimana

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2025/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugatlah yang bekerja sementara Tergugat tidak mau mencari pekerjaan tambahan lain untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;

- Bahwa saksi melihat beberapa kali secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan saksi juga selalu mendengar cerita dari Penggugat mengenai masalah rumah tangganya;
- Bahwa saksi tahu pada Juni 2024, terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Penggugat dituduh selingkuh oleh Tergugat karena ada pesan masuk ke dalam handphonenya padahal sudah dijelaskan namun Tergugat tidak percaya hingga terjadilah pertengkaran diantara keduanya bahkan sampai Tergugat memukul Penggugat kemudian Tergugat pergi dari kediaman bersama membawa semua pakaiannya;
- Bahwa saksi tahu sejak kejadian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 tahun hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali namun tetap tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi selain alat bukti tersebut di atas kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis melalui aplikasi *e-court* sebagaimana dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk singkat dan lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, perkara ini termasuk perkara perkawinan sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2025/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 110/Pdt.G/2025/PA.Lbg melalui surat tercatat yang dikirim oleh Petugas tanggal 16 Juni 2025 dan diterima oleh orang yang tinggal serumah dengan Tergugat berada pada tanggal 17 Juni 2025 melalui aplikasi lacak kirim lalu dikirim lagi untuk kedua kali pada tanggal 26 Juni 2025 dan diterima oleh orang yang tinggal serumah dengan Tergugat pada tanggal 28 Juni 2025 melalui aplikasi lacak kirim, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat **tersebut harus diperiksa secara verstek**, vide Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه
Artinya: "Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut";

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 RBg. Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2025/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis akan tetapi sejak tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi keuangan rumah tangga dan Tergugat juga mempunyai sifat cemburu yang berlebihan hingga puncaknya Juni 2024, terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh karena ada pesan masuk ke dalam handphone padahal telah Penggugat sudah menjelaskan tidak kenal dengan pesan masuk tersebut tetapi Tergugat tidak percaya hingga terjadilah pertengkaran diantara keduanya bahkan sampai Tergugat memukul Penggugat kemudian Tergugat pergi dari kediaman bersama membawa semua pakaiannya sehingga sejak kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yakni kurang lebih selama 1 tahun hingga sekarang, karenanya Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Lebong;

Menimbang, bahwa memahami ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil dengan sah dan patut, maka secara hukum dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat di dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan Undang-Undang Perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas isteri dan anak-anak serta untuk menghindari

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2025/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. jo Pasal 1870 KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dimana membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Januari 2008 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kabupaten Lebong, dengan demikian Penggugat merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg Jis. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2025/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas dikaitkan dengan keterangan Penggugat maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 Januari 2008 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kabupaten Lebong dimana selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi keuangan rumah tangga dan Tergugat juga mempunyai sifat cemburu yang berlebihan hingga puncaknya Juni 2024, terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh karena ada pesan masuk ke dalam handphone padahal telah Penggugat sudah menjelaskan tidak kenal dengan pesan masuk tersebut tetapi Tergugat tidak percaya hingga terjadilah pertengkaran diantara keduanya bahkan sampai Tergugat memukul Penggugat kemudian Tergugat pergi dari kediaman bersama membawa semua pakaiannya sehingga sejak kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yakni kurang lebih selama 1 tahun hingga sekarang;
- Bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dan tidak terjalin komunikasi secara baik serta selama itu pula telah diupayakan oleh pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Tergugat sebagai suami maupun Penggugat sebagai isteri jelas tidak dapat

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2025/PA.Lbg



melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada masalahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk Syar'i di dalam Kitab *Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527 *thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة
الزوجية جحيما و بلاء

artinya : *"Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak seperti neraka dan bencana";*

- Bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabaq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 *thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو(أي لخلاف) وتغصت المعاش

Artinya : *"Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk";*

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2025/PA.Lbg



- Bahwa disamping itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tenang, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madllarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madllaratnya. Hal ini sejalan dengan qaidah fiqhiyah thalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah kerusakan/kemadllaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat”;

- Bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun hingga sekarang dan tidak ada komunikasi yang baik lagi serta terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023** tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yakni dalam Rumusan Kamar Agama huruf C angka 1 yang menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b point 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dimana dikatakan “*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan* kecuali ditemukan fakta hukum

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2025/PA.Lbg



adanya *Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*”, sehingga Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat **dapat dikabulkan**;

- Bahwa mengenai penyebab terjadinya rumah tangga yang tidak harmonis maka dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “*apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal serta tidak ada komunikasi, maka rumah tangga mereka telah pecah, tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar*” dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f);
- Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan dari sebab telah terbuktinya dalil gugatan serta telah terpenuhinya unsur-unsur perceraian, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 1, gugatan Penggugat pada petitum primer angka 2 **dapat dikabulkan** sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat **dapat dikabulkan dengan verstek**;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2025/PA.Lbg



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak *satu ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp204.000,00 (*dua ratus empat ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lebong pada hari Jum'at tanggal 11 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1447 Hijriyah oleh **M. Yanis Saputra S.H.I., M.H** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 166/KMA/HK.05/12/2018 tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari tersebut oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Zulvayana, S.H.I.** sebagai Panitera Sidang dan kepada Tergugat disampaikan melalui surat tercatat, sebagaimana sidang tersebut dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Ttd

M. Yanis Saputra S.H.I., M.H.

Panitera Sidang

Ttd

Zulvayana, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2025/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	34.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	204.000,00

(dua ratus empat ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2025/PA.Lbg